

**STRATEGI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN  
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2009  
(Kasus : Calon Legislatif Perempuan dari Partai Demokrat di Kabupaten Bungo)**

**Oleh :  
MIRANTI  
0921202015**

**T E S I S**

**Sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah  
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2011**

**POTENSI DAN STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH  
STUDI KASUS DI KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

oleh : **LIS ELFIANTI,SE**

(Dibawah bimbingan DR. Erwin, Msi dan DR. Sri Zul Chairiyah, MA)

**ABSTRAK**

Tesis ini bertujuan secara umum untuk menganalisis : 1. Mengidentifikasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung. 2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung. 3. Menganalisis Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung. Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dari Davey, Warsito Utomo bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, teori kinerja birokrasi David Osborne dan Peter Plastrik serta teori kebijakan publik Josef Riwo Kaho ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, pengelolaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, masih banyaknya kendala di lapangan. *Kedua*, Setelah dianalisis ditemukan 3 penyebab Belum optimalnya pengelolaan Potensi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, potensi PAD faktor penyebabnya : 1) belum tersedianya data basis objek, potensi dan pemetaan Pajak, dan Retribusi Daerah, karenanya besaran pajak dan retribusi, proses pengenaanya belum berdasarkan data potensi yang seharusnya dapat terealisasi, 2) pengaruh Tiga sektor Aktivitas ekonomi wilayah memiliki pengaruh signifikan terbesar, sektor pertanian, Sektor pertambangan dan Sektor jasa, 3) Pengaruh kinerja Ekonomi yang mampu meningkatkan PDRB dan PAD.. *Ketiga*, Strategi dan kebijakan guna Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah 1. Ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah 2. Perubahan Struktur Ekonomi

Daerah 3 Intensifikasi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada, 4. Memanfaatkan Peluang dan mendayagunakan Tantangan memajukan sistim agribisnis dengan sektor agroindustri sebagai komponen penerimaan Pajak dan retribusi Daerah 5.Peningkatan Kemampuan mengelola'Dinamika perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masih relatif terbatasnya sejumlah posisi di dalam ranah publik yang berhasil diraih oleh kaum perempuan, seperti misalnya di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat lokal, regional maupun nasional sering dijadikan indikasi mengenai besarnya kesenjangan antara peraih status perempuan dan laki-laki di bidang politik.

Kehidupan politik termasuk partai politik dan parlemen merupakan bidang-bidang kegiatan yang bias gender. Untuk jangka waktu yang cukup lama hingga saat ini keseluruhan bidang politik ini didominasi kaum laki-laki. Sementara perempuan hampir tidak berperan di dalamnya, seolah-olah ada anggapan bahwa kehidupan politik bukan dunianya kaum perempuan sehubungan dengan sifatnya yang mengandung kekerasan, ketidakjujuran, tipu muslihat dan lain-lain.

**Tabel 1**

Komposisi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Jambi

<b>Tahun</b>	<b>Laki-laki (%)</b>	<b>Perempuan (%)</b>	<b>Jumlah</b>
1999	42 orang (93,9)	3 orang (6,1)	45 orang
2004	41 orang (81,1)	4 orang (8,9)	45 orang
2009	41 orang (81,1)	4 orang (8,9)	45 orang

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1999 jumlah perempuan yang duduk di badan legislatif di Propinsi Jambi berjumlah 3 orang dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 45 orang. Jika dipersentasekan berjumlah 6,1%. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah perempuan yang

duduk di badan legislatif meningkat menjadi 8,9% atau berjumlah 4 orang dari jumlah anggota dewan 45 orang, berarti jumlahnya mengalami peningkatan dari Pemilihan Umum sebelumnya. Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 jumlah perempuan yang duduk di dewan tidak mengalami peningkatan, dengan jumlah 4 orang perempuan yang duduk di dewan. Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa kuota 30% suara perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Propinsi Jambi belum terpenuhi. Seharusnya dari total keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 45 orang kuota keterwakilan perempuan yang duduk di dewan berjumlah 14 orang. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah anggota dewan perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif dari tahun 1999-2004 jumlah perempuan yang duduk di badan legislatif mengalami kenaikan.

Jika dilihat dari fungsionaris partai politik, kepengurusan partai politik hampir semuanya di dominasi laki-laki hanya sebagian kecil perempuan yang menduduki jabatan di partai. Kecilnya jumlah perempuan yang duduk di partai politik dan badan legislatif menyebabkan kurang berpengaruhnya proses pengambilan keputusan dan produk kebijakan yang menyuarakan aspirasi perempuan.

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah termasuk Hak Asasi Manusia, karena demokrasi tidak mungkin bisa dibangun tanpa keikutsertaan perempuan. Ini memperlihatkan pandangan partai politik mengenai peran politik perempuan serta gagasan kuota. Partai-partai politik tampaknya kurang memandang penting peran aktif perempuan dibidang politik. Bahkan muncul kesan, bagi partai-partai tersebut pemajuan kondisi perempuan di Indonesia akan datang dengan sendirinya bersamaan dengan terwujudnya demokrasi di negara ini dan pada

penghormatan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan Hak Asasi Manusia perempuan.

Ada berbagai alasan yang sering di kemukakan berkaitan dengan sukarnya akses perempuan dalam peran-peran publik tersebut. **Alasan pertama** kita masih dalam budaya patriarkhi mencirikan kepemimpinan laki-laki, tidak peka gender, dan kurang leluasa memberikan peranan kepada kaum perempuan untuk akses tersebut. Dalam masyarakat patriarkhi seperti Indonesia, peluang perempuan untuk meraih jabatan-jabatan itu membutuhkan pengorbanan tersendiri (kalau tidak bergantung pada nasib). Para politik kita yang kebanyakan kaum laki-laki, kecil kemungkinan mengakomodasi kepentingan perempuan. **Alasan kedua**, perempuan sendiri memang tidak berusaha mendapatkan kedudukan itu. Mereka cukup puas berada dibelakang layar, peran-peran publik dengan mendukung perjuangan laki-laki yang nota bene antara lain suami, kakak, kakek, atau saudara laki-laki mereka. Dalam konteks ini berlaku falsafah *trickle down effect*, yakni ketika laki-laki memperoleh kedudukan, keuntungan dan kesejahteraan tentu akan menetes dan ikut mensejahterakan perempuan.

Bagaimanapun pada hakikatnya, sebagaimana konsep nurture (perbedaan laki-laki dengan perempuan adalah sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya) dan nature (kodrat/alam) yang untuk selanjutnya membedakan peran dan tugas yang berbeda. Karena perbedaan yang demikian, maka tidak mungkin kaum perempuan mampu menyetarakan dirinya dengan kaum laki-laki. Karena itu di cari suatu terobosan untuk mencapai adanya keadilan gender.

Kesetaraan gender, berarti perempuan dan laki-laki menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan konstribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi,

sosial, dan budaya. Dengan demikian kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.

Lalu mengapa perempuan perlu berpolitik? Berikut adalah alasannya.

1. trend global peran perempuan yang semakin mengemuka di semua lini kehidupan.
2. komitmen politik untuk sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif.
3. peluang era demokrasi-reformasi dan pemilihan langsung/basis kompetensi untuk posisi-posisi strategis di publik
4. trend keadilan dan kesetaraan gender (KKG) di tingkat nasional dan internasional yang semakin berpengaruh, akan tetapi masih tetap diperjuangkan dan diperebutkan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal demikian, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sehubungan dengan kesetaraan gender tersebut, pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu partai politik. Prinsip kesetaraan gender di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, maupun Undang-undang yang mengatur hal yang sama tentang *Affirmative Action*, dimana minimal harus terdapat 30 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2

Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan media hukum yang revolusioner di bidang kepartaipolitik di negeri ini.

Rendahnya representasi perempuan dalam politik formal merupakan masalah penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Karena dengan keadaan seperti itu maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjadi kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan-kepentingan perempuan. Dengan memasukkan berbagai kepentingan perempuan diharapkan dalam pengambilan keputusan dapat lebih sensitif terhadap berbagai macam perbedaan tidak saja perbedaan kepentingan gender, tapi juga perbedaan-perbedaan kelas sosial, suku, agama, orientasi seksual, dan lain-lain. Agar suara perempuan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik.

Keterwakilan perempuan dalam Sistem Pemilihan Umum Proporsional terbuka sebenarnya sudah diberikan kesempatan melalui sistem kuota 30% sebagai “tindakan khusus sementara” (*affirmatife action*) untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diperlemen sehingga mencapai sedikitnya minoritas kritis yaitu 30% dari total anggota parlemen.

Namun ternyata persoalan tidak selesai dengan kuota. Pasalnya, ketika daftar calon legislatif disusun oleh partai-partai peserta Pemilihan Umum tampak calon legislatif-calon legislatif perempuan tidak ditempati di “nomor jadi”. Apabila dilihat lebih dalam memang para pengurus partai mayoritas adalah laki-laki. Partisipasi politik dalam hal keikutsertaan perempuan sebagai calon legislatif memang cukup tinggi, akan tetapi akses perempuan untuk maju dalam nomor jadi akan selalu dihadapkan dengan adanya pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih berkualitas dibandingkan perempuan apalagi dengan dominasi laki-laki dalam kepengurusan partai politik.

Hasrat sebagian besar kalangan perempuan di Indonesia saat ini, adalah bagaimana dapat memenuhi keterwakilan kuota 30%. Keberhasilan penetapan kuota jelas merupakan langkah awal peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Keinginan memenuhi keterwakilan 30% tidak keliru dalam konteks Pengarus Utamaan Gender dalam pembangunan tapi perlu dilandasi oleh suatu perencanaan yang terorganisir dan mantap. Implementasi keinginan ini dapat saja tertunda dan terhalangi dengan berbagai macam alasan, baik dari diri perempuan itu sendiri maupun dari luar perempuan. Misalnya, sulit mencari perempuan yang mau aktif berpolitik, ada yang mau tapi tidak berkualitas, tidak ada izin dari suami, atau prangsangka negatif dari laki-laki. Sebagai contoh, keterwakilan 30% untuk perempuan berpartisipasi dalam politik acap ditafsirkan secara keliru, yaitu diindikasikan sebagai kehendak perempuan untuk bersaing dengan lelaki atau sebaliknya kaum lelaki merasa porsi mereka akan tergunduli dan karenanya mereka mulai pasang kuda-kuda.

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 semua calon legislatif apakah dia seorang politisi senior atau junior, seorang calon legislatif laki-laki atau perempuan atau ditempatkan di nomor urut pilihan yang kecil atau yang besar, semuanya akan memiliki peluang setara untuk terpilih dan juga tidak terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Strategi yang harus dilakukan oleh masing-masing calon legislatif hanya satu yaitu, bagaimana memperoleh “suara terbanyak”. Rumusnya sangat sederhana, yaitu popularitas ditambah elektabilitas menghasilkan jumlah suara terbanyak dan suara untuk satu kursi. Di dalam situasi politik seperti ini, cara berpolitik dengan menerapkan nasehat politik Machiavelli akan dengan mudah dijumpai di berbagai tempat. Mekanisme ini menunjukkan adanya dan akan terjadi persaingan bebas antar-politisi, internal dan eksternal partai, lelaki vs perempuan. Dengan kata lain, ada pembelajaran

politik bagi semangat demokrasi yang baik dan adil bagi kehidupan demokrasi bangsa. Dengan demikian, partai politik mau tidak mau harus merevitalisasi peran dan kinerjanya dalam membangun institusi partai menjadi lebih modern dan menghasilkan calon legislatif yang berkualitas, dikenal dan mampu menjaring konstituennya masing-masing.

Ketatnya persaingan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009, tidak saja akan terjadi antar calon legislatif dari partai politik lain, tetapi pada calon legislatif dari sesama teman satu partai. Bahkan, di daerah pemilihan (Dapil) yang samapun akan terjadi perang tanding antar teman separtai untuk memperoleh dan memenangkan suara terbanyak. Dalam hal ini, partai politik tidak akan memiliki satupun kekuatan yang terstruktur untuk membantu kader-kadernya agar dapat keluar atau dijagokan dan ditetapkan sebagai pemenang. Kemudian, yang ada hanyalah pertarungan antar individu dengan mengandalkan modal politik diri calon legislatif masing-masing.

Kehadiran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perkembangan yang cukup signifikan bagi kondisi politik perempuan di Kabupaten Bungo. Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bungo total keseluruhan calon legislatif berjumlah 410 orang, dengan rincian calon anggota legislatif laki-laki berjumlah 301 orang dan jumlah calon legislatif perempuan berjumlah 109 orang. Dari data jumlah calon legislatif tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi politik perempuan untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo cukup tinggi. Perempuan-perempuan yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bungo berasal dari

berbagai macam suku, pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Mereka dengan antusias ikut mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. Hal ini cukup menarik untuk di teliti karena dari jumlah calon legislatif perempuan yang ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bungo jumlahnya cukup besar akan tetapi calon legislatif perempuan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo hanya berjumlah 2 orang dari total calon legislatif perempuan yang berjumlah 109 orang.

Rendahnya jumlah perempuan yang mendapatkan kursi menjadi fenomena politik yang terjadi di Kabupaten Bungo. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bungo, perempuan yang ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 kemarin mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, hampir 80% calon legislatif perempuan tersebut lulusan Strata-1. Mereka merupakan perempuan yang cukup berkompeten untuk ikut dalam percaturan politik dan seharusnya mampu bersaing dengan calon legislatif laki-laki. Akan tetapi realita dilapangan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para calon legislatif perempuan karena dari hasil perhitungan suara calon legislatif laki-laki lebih banyak mendapatkan kursi dibandingkan calon legislatif perempuan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sendiri dari total keseluruhan anggota Dewan yang berjumlah 30 orang hanya 2 orang calon legislatif perempuan yang mendapatkan kursi sementara 28 orang kursi di Dewan ditempati oleh calon legislatif laki-laki.

Padahal berdasarkan data Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bungo dari 17 kecamatan yang ada yaitu; Pasar Muara Bungo, Bathin 2 Babeko, Rantau Pandan, Muko-muko Bathin VII, Pelepat, Pelepat Ilir, Tanah Sepenggal,

Tanah Sepenggal Lintas, Bathin III, Bathin III Ulu, Tanah Tumbuh, Limbur Lubuk Mengkuang, Jujuhan, Jujuhan Ilir, Bathin II Pelayang, Rimbo Tengah, Bungo Dani. Dengan jumlah daftar pemilih tetap secara keseluruhan berjumlah 163.322 yang terdiri dari daftar pemilih tetap laki-laki 83.189 orang dan jumlah daftar pemilih tetap perempuan 80.133 orang, seharusnya jumlah keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Bungo sudah mencapai kuota 30% suara keterwakilan perempuan. Karena dari jumlah daftar pemilih tetap, jumlah pemilih perempuan yang terdaftar tidak begitu jauh berbeda jumlahnya dibandingkan jumlah daftar pemilih tetap laki-laki. Akan tetapi perolehan suara di Dewan menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anggota legislatif perempuan.

Berikut data mengenai jumlah anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009.

**Tabel 2**

Daftar Nama Partai Politik yang Berhasil Menempatkan Calon Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009

<b>Nama Partai</b>	<b>Tahun 2009</b>	<b>Jumlah Anggota Dewan Keseluruhan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Partai Demokrat	1 orang	30 orang	3,3%
Partai Bintang Reformasi	1 orang	30 orang	3,3%
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>2 orang</b>	<b>30 orang</b>	<b>6,6%</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bungo

Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 jumlah perempuan yang duduk di dewan berjumlah 2 orang. Apabila dipersentasekan menjadi 6,6% dari total jumlah keseluruhan dewan sebanyak 30 orang. Jumlah tersebut jelas belum memenuhi kuota

suara perempuan di dewan yang seharusnya berjumlah 9 orang dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 30 orang.

Dari 2 orang jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo, calon legislatif perempuan yang terpilih dari partai Demokrat cukup menarik untuk diteliti. Disamping usianya yang masih sangat muda, kiprahnya di dunia politik cukup diperhitungkan karena kemampuannya untuk bersaing dengan 108 orang calon legislatif perempuan dalam memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. Ini terbukti dengan keberhasilan Ria Mayang Sari dalam mendapatkan perolehan suara terbanyak sehingga menghantarkan dia menjadi anggota dewan termuda di Kabupaten Bungo. Walaupun tergolong anggota partai politik yang baru dalam kaderisasi di tubuh partai Demokrat akan tetapi kinerja dan sepak terjangnya di partai Demokrat cukup diperhitungkan. Dengan menempati jabatan struktural di Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I di bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia menghantarkan dia menjadi calon anggota legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bungo. Didukung oleh kekuatan Modalitas yang dia punya serta Strategi Politik yang dia gunakan, menjadikan keberhasilannya dalam memperoleh kemenangan untuk menjadi anggota Dewan mengalahkan 108 calon legislatif perempuan lainnya. Dalam perjalanan menuju kursi anggota legislatif banyak hal yang harus dilakukannya untuk bersaing melawan calon legislatif perempuan dari partai politik lainnya, dan juga banyak cara yang harus dia lakukan untuk mendapatkan simpati pemilih untuk memilihnya agar dapat memperoleh suara terbanyak. Ada beberapa strategi politik yang Ria Mayang Sari lakukan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009, baik itu dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan :

Tampilnya perempuan di arena elektoral pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 harus berhadapan dengan elit lokal dan nasional yang nota bene memiliki modalitas. Inilah salah satu tantangan tersendiri buat calon anggota legislatif perempuan yang bertarung di arena elektoral pada Pemilihan Umum Legislatif secara demokratis. Kemenangan Ria Mayang Sari di elektoral pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, antara lain karena Ria Mayang Sari mampu mengkapitalisasi modalitas sebagai strategi politik di arena elektoral dan juga memiliki kharisma di masyarakat. Dengan latar pendidikan yang cukup tinggi dan diukung oleh kekuatan modal ekonomi karena dibesarkan di keluarga seorang pengusaha sukses dan terpandang di Kabupaten Bungo. Dengan status social yang tinggi dimata masyarakat karena ayahnya seorang Wakil Gubernur Propinsi Jambi, oomnya seorang mantan Ketua DPRD Kabupaten Bungo dan sepupunya anggota DPRD sekaligus Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bungo. Hal tersebut tentu saja semakin memperkuat kedudukannya baik dalam modal social, ekonomi, dan politik.

Ria Mayang Sari didukung oleh masyarakat basis daerah pemilihannya dan juga didukung oleh masyarakat adat dan struktur lembaga adatnya. Disamping itu juga Ria Mayang Sari yang secara intelektual dan secara politik sudah di akui oleh publik di Muara Bungo khususnya di Daerah Pemilihan 2 yang terdiri dari kecamatan Pelepat dan Pelepat Iilir. Karena dia sudah cukup berpengalaman sebagai politisi walaupun masih

muda dan baru menjadi kader di partai Demokrat akan tetapi dia sudah membangun banyak relasi.

Sosialisasi Ria Mayang Sari terhadap publik dan komunikasi politik dengan elit lokal dan masyarakatnya sangat terjalin dengan baik sehingga dia mendapatkan banyak pendukung dari masyarakat basis daerah pemilihannya. Dia juga di dukung oleh struktur adat di wilayahnya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Ria Mayang Sari kepada masyarakat dan relasinya sangat bagus, karena komunikasi politik sangat diperlukan sebagai media atau proses penyampaian pesan (pembangunan politik) dari seseorang ke orang lain, sekelompok orang, dan masyarakat luas agar kapabilitas diri menjadi meningkat. Bentuk-bentuk komunikasi politik yang dipakai dan dikembangkan oleh Ria Mayang Sari sebagai seorang politisi yaitu; pengembangan opini publik, lobby politik, komunikasi pemasaran politik. Dalam hal ini, Ria Mayang Sari sebagai calon legislatif perempuan memiliki cara berkomunikasi yang khas dibandingkan calon legislatif lainnya. Dia menggunakan cara komunikasi dengan sikap saling percaya antara dia dan konstituennya. Rasa saling percaya itu dibentuk lewat perkawanan dan bukan menjadikan konstituen sebagai objek untuk memperoleh suara pada saat pemilihan umum.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dapat di ketahui bahwa Ria Mayang Sari mendapat dukungan penuh dari keluarga dan lingkungannya. Bila dilihat dari 3 teori yang digunakan Ria Mayang Sari bisa menghubungkan ketiga teori tersebut. Dengan memiliki modalitas yang kuat baik dari modal sosial, ekonomi, budaya, politik, dan simbolik dia bisa dengan mudah menggunakan strategi ofensif yaitu dengan cara mempertahankan pasar sedangkan 7 calon legislatif perempuan lainnya hanya bisa menggunakan strategi defensif yaitu memperluas pasar karena mereka belum

mempunyai 5 modal yang kuat sehingga mereka harus memulai dari bawah agar mereka bisa dikenal oleh masyarakat basis pemilihnya. Dalam hal teori gender yang Ria Mayang Sari tidak mempunyai hambatan dari faktor internal karena dia telah mendapat dukungan penuh dari suami dan keluarganya sedangkan dari lingkungan eksternal dia sudah banyak mendapat dukungan dari massa basis daerah pemilihannya. Sedangkan 7 calon legislatif perempuan lainnya cukup banyak mendapat hambatan dari lingkungan internal karena budaya patriarki yang ada di Kabupaten Bungo cukup kuat karena istri berkewajiban penuh untuk melayani suami dan anak-anaknya serta tidak boleh terlalu lama dan sering bepergian keluar rumah tanpa didampingi oleh suami. Sementara itu lingkungan eksternal 7 calon legislatif perempuan tersebut baru dikenal oleh masyarakat sehingga mereka harus berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi diri mereka terhadap masyarakat basis daerah pemilihannya.

Secara singkat peran kepemilikan modalitas dalam memantapkan strategi pemenangan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Dalam sebuah kompetisi elektoral, kapitalisasi modalitas merupakan satu strategi yang dapat digunakan oleh setiap calon legislatif untuk memenangkan suara dalam proses pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 2009. *Menjadi Pemimpin Politik; Perbincangan Kepimpinan dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Almond, A. Gabriel & Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik; Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Di Lima Negara*. Bumi aksara, Jakarta.
- Andrian, Charles, 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosialnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik; Penelusuran Paradigma*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Creswell, John. 2002. *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. Jakarta: KIK Press.
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fakih, Mansour, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Field, John, 2010. *Modal Sosial*, Kreasi wacana, Surabaya.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Obor Indonesia, Jakarta.
- Fithriati, Maryam, Peran Partai dan Perempuan Partai dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Menjelang Pemilu 2004. *Tesis* tidak untuk diterbitkan. Jakarta:Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2007.
- Fukuyama, Francis 2007. *Trust; Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Penerbit Qalam, Yogyakarta.
- Haryanto, 2005. *Kekuasaan dan elit (Suatu bahasa pengantar)*. S2 PLOD UGM dan JIP UGM.
- Haryatmoko, 2003, *Landasan Teoretis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu*, Artikel.

- Holik, Idham, Strategi Komunikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2004: Evaluasi Strategi Komunikasi Politik Partai PKB Kab. Bekasi Tentang Isu Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif. *Tesis* tidak untuk diterbitkan, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.
- Ihromi, T.O, 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Iver, Mac . 1988. “ *Negara Moderen*”, Penerbit Aksara baru, Jakarta.
- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca pikiran Pierre Bourdieu*, Kreasi wacana, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Maleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moesafa, Prihatmoko J Joko. 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai* Pustaka Pelajar Bekerja sama dengan Universitas Wahid Hasim Semarang, Yogyakarta.
- Musdah, Siti, 2005. *Perempuan dan Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Naser, Sudirman, 2009, “*SBY : antara modal politik dan modal simbolik*” [http://berita.liputan6.com/kolom/200911/251345/sby\\_antara\\_modal\\_politik\\_dan\\_modal\\_](http://berita.liputan6.com/kolom/200911/251345/sby_antara_modal_politik_dan_modal_), diakses pada tanggal, 10 febuari 2011.
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing; Strategi Memenangkan Pemilu sebuah pendekatan Baru Kampanye pemilihan DPR,DPD Presiden*, Gramedia, Jakarta.
- Parekh, Bhikhu,. 2008. *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Pustaka Kanisius, Yogyakarta.
- Pamungkas, Cahyo, 2009, *Reproduksi Relasi Dominasi Dalam Pemilih : pertarungan politik dan simbolik*, Artikel.
- Partanto dan Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Rahman, Ruslan, 2009, *Penggunaan Simbol-simbol Budaya dalam Kampanye Pilcaleg di Kota Bau-Bau*, Kumpulan Makala Seminar Internasional X Kampoeng Percik, Salatiga.
- Ridzal, Fauzie, dkk, 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Said, Aziz, Abdul, 2004. *Toraja Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Schroder, Peter 2004. *Strategi politik (Politische Strategien)*. Fredrich-Naumann-Stiftung, Jakarta.

Subagyo, Joko, 1992. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Subhan, Zaitunah, 2002. *Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Membangun Good Governance*. Jakarta: El- Kahfi.

Sosiosains, Volume 19, Nomor : 3, 2006, penelitian.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Urbaningrum, Anas, 2010, *Revolusi Sunyi, Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang di Pemilu*, Mizan, Jakarta.